

Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya

Dinta Fernanda Maulidya¹, Agus Widiyarta²

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21041010078@student.upnjatim.ac.id¹, agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The development of information technology has made the government continuously innovate by implementing the concept of digitalizing public services, including in the scope of population administration. Surabaya, with a population of 2,893,698 people, certainly faces various dynamics of population administration issues that demand the government to effectively and efficiently address these problems through the e-Government system. One of them is by launching the Digital Population Identity application that includes the ID card and family card with a centralized system under the Ministry of Home Affairs, starting from 2023. The aim of this research is to determine the optimization efforts of the IKD activation service in supporting the digital transformation of population administration in the Kalisari sub-district of Surabaya. In this research, the author uses a qualitative method with a descriptive approach model and utilizes primary data obtained from observations, interviews, and direct documentation at the research site. Meanwhile, secondary data is obtained through literature studies by tracing references such as books, scientific articles, data graphics, and previous research. The research results with optimization theory show that the efforts to optimize the IKD activation service in Kalisari sub-district can be categorized as good, but have not yet reached maximum evenness due to the presence of residents who are not aware of the urgency of population administration order. Therefore, there is a need for a new, more intensive strategy to increase the percentage of IKD ownership in the Kalisari sub-district of Surabaya.

Keywords: digital population identity; population administration; public service; digitization of bureaucracy

ABSTRAK

Adanya perkembangan teknologi informasi membuat Pemerintah terus berinovasi dengan menerapkan konsep digitalisasi layanan publik termasuk dalam lingkup administrasi kependudukan. Kota Surabaya dengan jumlah penduduk mencapai 2.893.698 jiwa tentu menghadapi berbagai dinamika persoalan adminduk yang menuntut pemerintah dapat mengatasi masalah tersebut dengan efektif serta efisien melalui sistem *e-Government*. Salah satunya dengan cara meluncurkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang memuat KTP dan Kartu Keluarga dengan sistem terpusat yang berada di naungan Kementerian Dalam Negeri terhitung sejak tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya optimalisasi layanan aktivasi IKD dalam mendukung transformasi digital administrasi kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan deskriptif serta pemanfaatan data primer yang didapat dari hasil observasi, wawancara, hingga dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi literatur dengan penelusuran referensi berupa buku,

artikel ilmiah, grafik data, serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian dengan teori optimalisasi menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari sudah dapat dikategorikan baik namun belum mencapai pemerataan yang maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang belum sadar akan urgensi tertib adminduk sehingga perlu adanya strategi baru yang lebih intensif untuk meningkatkan persentase jumlah kepemilikan IKD yang ada di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya.

Kata kunci: identitas kependudukan digital; administrasi kependudukan; pelayanan publik; digitalisasi birokrasi

PENDAHULUAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan tak terkecuali pada sistem pemerintahan. Dengan adanya rencana pembentukan *e-government* berbasis *Good Governance* membuat Pemerintah terus berinovasi dalam mewujudkan pelayanan publik prima terhadap seluruh lapisan masyarakat berbasis digital pada abad ke-21 ini. Digitalisasi pelayanan publik merupakan tuntutan sekaligus tantangan baru bagi pemerintah dengan harapan dapat mengubah sistem pelayanan tradisional yang dianggap lamban menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis sehingga dapat mencapai efektivitas dan efisiensi layanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik didefinisikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas pelayanan secara umum untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat baik berupa barang maupun jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, badan hukum, hingga lembaga independen yang berfungsi sebagai penyelenggara layanan publik dengan pedoman prosedur dan aturan hukum yang berlaku (Maryam, 2016). Dalam hal ini, kewajiban pemerintah dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya pada pelayanan publik telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kota Surabaya sebagai salah satu pengusung kota pintar (*Surabaya Smart City*) berbasis digital yang mengusung konsep seluruh layanan publik dapat diakses melalui satu laman jaringan dengan sekuritas tinggi dan terintegrasi oleh data pusat dengan jumlah penduduk terbesar kedua yang mencapai 2.893.698 jiwa dengan rincian 1.433.967 penduduk laki-laki dan 1.459.731 penduduk perempuan pada tahun 2023 merujuk pada data BPS Provinsi Jatim 2023.

| Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kota Surabaya Tahun 2023 | |
|--|-----------|
| Laki-laki | 1.433.967 |
| Perempuan | 1.459.731 |
| Laki-laki dan perempuan | 2.893.698 |

Sumber: BPS Jatim 2023

Besarnya jumlah penduduk ini membuat Pemerintah Kota Surabaya harus mengoptimalkan fungsi sistem informasi data kependudukan (SIAK) sehingga

dapat meminimalisir adanya kebocoran identitas maupun data ganda. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya telah menggencarkan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhitung sejak April 2023 yang dapat dilakukan di seluruh kantor kelurahan dan ~~lurah~~ atau pusat perbelanjaan seperti Tunjungan Plaza dan Galaxy Mall pada periode tertentu dengan jadwal yang dapat diakses oleh publik. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini dapat diunduh melalui perangkat Android maupun iOS pada Google Play Store dan AppStore secara gratis dengan proses pengunduhan yang cepat dan tidak memakan banyak memori atau penyimpanan. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan digital meliputi KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta Kartu Keluarga (KK) yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan blangko fisik yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surabaya sehingga pengajuan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara fleksibel dan praktis dengan perangkat elektronik masing-masing mengingat bahwa selama ini masyarakat kerap mengeluh dengan ketersediaan blangko KTP dan dokumen kependudukan yang terbatas sehingga proses pencetakan dokumen membutuhkan waktu cukup lama dan sering kali di luar estimasi.

Aktivasi IKD merupakan implementasi dari fungsi digitalisasi pelayanan publik dengan sistem terpusat dan terintergritas sehingga dokumen yang ada dalam aplikasi tersebut bersifat privat dan hanya dapat diakses oleh pemilik identitas dengan batasan satu perangkat hanya dapat digunakan oleh satu *user*/pengguna saja. Kota Surabaya sebagai pelopor aktivasi IKD di Indonesia sekaligus *role model* penerapan digitalisasi untuk daerah lainnya seperti kabupaten atau kota kecil yang diharapkan layanan aktivasi IKD ini dapat dilaksanakan secara merata ke seluruh daerah sehingga di masa yang akan datang, KTP fisik tidak lagi diperlukan dan IKD sudah dapat mengakomodir segala persyaratan administratif mencakup perbankan, imigrasi, jual beli aset, transaksi elektronik, dan lain sebagainya. Riset ini menjelaskan secara lebih lanjut terkait dengan upaya Kelurahan Kalisari Kota Surabaya dalam mengoptimalkan layanan IKD bagi warga guna mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital.

KAJIAN TEORI

Optimalisasi menurut Winardi, 2015 didefinisikan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan atas upaya yang telah dilakukan sebagai titik atau nilai terbaik. Optimalisasi juga dianggap sebagai sebuah hasil yang diharapkan dan telah tercapai dengan cara efektif serta efisien sesuai dengan rencana awal atau target yang diinginkan (Poerdwadarminta, 1997). Sedangkan menurut Sidik (2001: 8) mengungkapkan bahwa optimalisasi merupakan segala bentuk aktivitas yang menghasilkan peningkatan atau pengoptimalan sesuai tujuan yang diinginkan. Menurutnya, terdapat 3 indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam mengukur optimalisasi sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dapat dijabarkan melalui 2 bentuk yaitu maksimum dan minimum.

Maksimum dapat digunakan apabila optimalisasi tersebut memiliki korelasi dengan rekognisi, profit, dan semacamnya. Sedangkan minimum dapat digunakan apabila optimalisasi berkaitan dengan waktu, jarak, biaya, dan sejenisnya.

2. Keputusan Alternatif

Merupakan beberapa opsi yang dijadikan upaya serta pedoman dalam mengoptimalkan sesuatu yang akan dijalankan sehingga tujuan dapat tercapai dengan semestinya.

3. Disposisi

Merupakan pernyataan sikap dari pemangku kebijakan terhadap keputusan yang akan diambil sehingga dapat menentukan keberlanjutan komitmen dari suatu program yang sedang dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan model pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui optimalisasi pelayanan aktivasi IKD yang adadi Kelurahan Kalisari berbasis deskripsi kenyataan maupun peristiwa yang berlangsung di lapangan. Adapun sumber daya dalam penelitian ini diperoleh dari 2 jenis data, data primer didapat dari hasil observasi, wawancara, hingga pengambilan dokumentasi secara langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapat melalui studi literatur dengan penelusuran referensi berupa buku, artikel ilmiah, grafik data, serta penelitian terdahulu yang diidentifikasi melalui tiga indikator meliputi tujuan, keputusan alternatif, serta disposisi. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kelurahan Kalisari Kota Surabaya dan berlangsung selama satu bulan dengan melibatkan staf atau pegawai serta masyarakat sebagai pengguna layanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan

Aktivasi pelayanan identitas kependudukan digital atau KTP digital diarahkan untuk mencapai sejumlah tujuan strategis yang mencakup efisiensi administrasi, peningkatan layanan publik, keamanan identitas, pemberdayaan masyarakat, inovasi teknologi, pengurangan biaya operasional, serta pengembangan ekosistem digital yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 dan merupakan aplikasi luncuran dari Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Dengan memanfaatkan teknologi digital, Pemerintah bertujuan meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi identitas penduduk, mengurangi beban pekerjaan pada lembaga pemerintahan terkait, dan menyederhanakan transaksi publik.

Selain itu, adanya IKD juga bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dengan memberikan kemudahan akses dan kenyamanan dalam berbagai transaksi sehari-hari seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tujuan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberdayaan teknologi informasi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna, di mana individu diberikan

kontrol lebih terhadap informasi pribadi mereka sendiri, sehingga meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan identitas digital.

Aspek keamanan identitas menjadi fokus penting dalam aktivasi IKD, dengan tujuan meminimalkan risiko pemalsuan identitas melalui penggunaan teknologi digital yang canggih. Metode autentikasi yang lebih aman juga diperkenalkan untuk melindungi identitas penduduk dari potensi kejahatan identitas. Selain itu, implementasi IKD membuka peluang untuk inovasi teknologi dengan mendorong pengembangan dan adopsi teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan dan *blockchain*, yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan identitas digital.

Pengurangan biaya operasional sebagai tujuan alternatif pemerintah di mana penerapan IKD diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengelolaan data identitas fisik mengingat banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan terbatasnya kesediaan blangko fisik dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini juga berkontribusi pada pengembangan ekosistem digital yang lebih luas, menciptakan peluang untuk integrasi dengan teknologi lain, serta mendorong pertumbuhan aplikasi dan layanan yang terkait dengan identitas digital.

Aplikasi ini dapat dengan mudah diunduh melalui Google Play Store maupun App Store di *smartphone* masing-masing pengguna. Saat proses aplikasi, pemohon wajib datang ke kantor kelurahan karena diperlukan adanya verifikasi identitas diri sesuai KTP atau KK fisik, pengiriman kode autentikasi melalui email dan *scan barcode* pada perangkat komputer yang tersambung dengan server SIAK terpusat.



Sumber: App Store

Sejauh ini, layanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya telah dijalankan dengan baik dan terdapat sekitar 3-6 warga yang melakukan aktivasi IKD setiap harinya.

Sebelum melakukan aktivasi, warga diberikan pengarahan terlebih dahulu oleh petugas operator SIAK terkait dengan prosedur serta tata cara aktivasi sehingga dapat memudahkan warga dalam proses aktivasi IKD. Sejumlah warga mengatakan bahwa IKD ini merupakan salah satu inovasi terbaik di era digital karena sering kali

warga mengeluhkan dokumen ~~kependudukan~~ fisik yang hilang atau rentan dengan kerusakan. Sedangkan dengan adanya aplikasi dan *e-document* atau dokumen elektronik dalam format PDF yang diberikan petugas ataupun didapat secara mandiri setelah pengajuan dokumen kependudukan dapat memudahkan warga dalam menyimpan dokumen kependudukan elektronik dalam *smartphone*-nya masing-masing. Terdapat 2 dokumen kependudukan yang tersedia dalam aplikasi IKD yaitu KTP digital dan Kartu Keluarga dengan tampilan sebagai berikut:



Sumber: App Store

2. Keputusan Alternatif

Pengambilan keputusan alternatif menjadi indikator penentu keberhasilan pelayanan publik dalam memecahkan masalah pada administrasi kependudukan. Kota Surabaya sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak selalu dihadapkan dengan berbagai macam kasus warga pada pengajuan administrasi kependudukan, terlebih hingga saat ini masih banyak warga yang belum tertib adminduk sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya meluncurkan program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Adminduk) dengan melibatkan mahasiswa dalam mengoptimalisasikan program tersebut terhitung sejak tahun 2021. Hingga saat ini terdapat peningkatan pengajuan dokumen kependudukan secara signifikan di setiap bulannya dengan persentase berbeda di setiap ~~wah~~

Salah satu layanan yang digencarkan pada program KALIMASADA ini adalah aktivasi IKD. Saat ini pemerintah telah merencanakan untuk menghapus KTP fisik dan diubah menjadi KTP digital yang ada di *smartphone*, sebelum membuat kebijakan terbaru tentu diperlukan adanya pemerataan kepemilikan IKD yang mampu menjangkau seluruh penduduk termasuk yang tidak memiliki perangkat elektronik pendukung. Realitasnya, hingga saat ini pemerintah masih cukup kesulitan dalam melakukan pemerataan IKD dikarenakan hingga sekarang hanya sejumlah kota besar

saja yang membuka layanan aktivasi IKD, sedangkan di kabupaten maupun kota kecil, layanan ini belum dapat dijalankan karena akses dan perangkat yang terbatas serta SDM yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan adanya cara alternatif agar warga mampu memahami urgensi kepemilikan IKD dan dapat meningkatkan persentase kepemilikan IKD khususnya di Kota Surabaya.

Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, persentase jumlah kepemilikan IKD pada warga Kelurahan Kalisari Kota Surabaya di tiap bulannya mengalami peningkatan walaupun belum cukup signifikan. Rekapitulasi data jumlah warga yang melakukan aktivasi IKD dalam kurun waktu empat bulan terakhir tahun 2023 termuat dalam data berikut:

| Periode | Jumlah Pemohon |
|-----------|----------------|
| September | 104 |
| Oktober | 128 |
| November | 122 |
| Desember | 156 |

Sumber: Hasil observasi peneliti

Dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan IKD yang ada di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya, petugas telah mengadakan sosialisasi urgensi aktivasi IKD yang turut menghadirkan seluruh ketua RT dan letua RW terutama RT rintisan dalam acara tersebut. Tak hanya itu, hari selasa malam selalu diadakan agenda pelayanan malam di Balai RW secara bergantian. Di Kelurahan Kalisari, terdapat sejumlah 8 RW dan 56 RT dengan total penduduk sebanyak 15.335 jiwa dengan persentase laki-laki sebanyak 7.526 jiwa dan perempuan sejumlah 7.829 jiwa. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD dengan yang belum aktivasi masih berbeda jauh, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap urgensi IKD sehingga petugas terus melakukan pelayanan rutin dan membagikan informasi IKD secara rutin melalui grup warga yang melibatkan seluruh ketua RT dan RW serta media sosial milik Kelurahan Kalisari seperti Instagram, TikTok, serta *website* secara periodik sejumlah empat konten dalam sebulan. Dengan upaya tersebut, peningkatan jumlah warga yang mengurus administrasi kependudukan baik di kantor, balai RW, maupun sistem jemput bola terus meningkat terhitung sejak awal hingga akhir tahun 2023. Tentunya hal ini tidak lepas dari kepatuhan pegawai terhadap prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup kerja baik dari segi pelayanan, ketertiban, dan lain sebagainya.

3. Disposisi

Adanya disposisi dalam suatu kebijakan yang telah diimplementasikan menjadi faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya target yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tersebut terutama dalam lingkup birokrasi pemerintahan, di

mana dalam hal ini pihak yang memiliki wewenang untuk memberi disposisi adalah pimpinan di suatu bidang atau instansi. Berjalannya suatu kebijakan di setiap instansi pasti memiliki hasil berbeda dikarenakan upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan berjalannya kebijakan tersebut juga berbeda. Pada lingkup Kelurahan Kalisari, segala bentuk tugas pokok dan fungsi pemerintahan diserahkan kepada kepala seksi pemerintahan.

Disposisi dalam konteks administrasi kependudukan mengacu pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang terkait dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan perlindungan data kependudukan. Tahap awal dari disposisi ini dimulai dengan pengumpulan data, yang melibatkan registrasi penduduk dengan mengumpulkan informasi seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan data pribadi lainnya. Setelah data terkumpul, perlu dilakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan keakuratan informasi berpedoman pada realitas penduduk yang ada di wilayah masing-masing. Pengolahan data juga mencakup pemutakhiran data secara berkala untuk merefleksikan perubahan dalam kehidupan penduduk, seperti perubahan alamat atau status perkawinan.

Aspek penyimpanan data dalam disposisi kependudukan memerlukan penciptaan sistem penyimpanan data yang aman dan terorganisir. Keamanan data menjadi suatu keharusan untuk melindungi informasi pribadi penduduk dari potensi penyalahgunaan atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Penggunaan data adalah langkah selanjutnya dalam disposisi, di mana informasi kependudukan digunakan untuk keperluan administratif, perencanaan pembangunan, dan penyediaan layanan publik. Contohnya termasuk penggunaan data dalam pemilihan umum, perencanaan kesehatan, atau penentuan distribusi bantuan sosial.

Perlindungan privasi menjadi fokus utama dalam pelaksanaan disposisi. Administrasi kependudukan harus menerapkan kebijakan dan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk memastikan bahwa data pribadi penduduk dijaga dengan ketat. Hal ini melibatkan pemantauan ketat terhadap akses data, kebijakan penggunaan data yang etis, dan langkah-langkah untuk merespons pelanggaran keamanan data. Selain itu, disposisi juga mencakup pemusnahan data yang tidak relevan atau sudah tidak diperlukan seperti data ganda atau identitas yang terblokir. Dalam menjamin keamanan data penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meluncurkan aplikasi yang disebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat. Di mana SIAK ini terhuung dengan server pusat Kementerian Dalam Negeri dan tersebar ke seluruh instansi Disdukcapil Indonesia.

Dalam implementasinya, aktivasi IKD perlu melibatkan SIAK sebagai wadah untuk registrasi KTP digital dan perlu melewati beberapa tahap verifikasi yang tentunya membantu menjamin sekuritas pengguna dan menghindari adanya data ganda, data palsu, maupun praktik mal data. Di Kelurahan Kalisari, SIAK hanya dapat diakses oleh operator yang diterjunkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sehingga tidak sembarang petugas dapat mengakses karena data yang termuat dalam SIAK bersifat privasi dan menghindari adanya penyalahgunaan data dan menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Operator SIAK yang

ada pada Kelurahan Kalisari tetap berada di bawah pengawasan kepala seksi pemerintahan.

Guna mengoptimalkan pemerataan kepemilikan IKD penduduk di Kelurahan Kalisari, setiap warga yang datang untuk mengurus administrasi kependudukan diwajibkan melakukan aktivasi IKD terutama pada penduduk yang sedang mengurus perubahan KTP maupun pindah datang sebagai syarat wajib pengajuan dokumen terbaru. Tak hanya itu, Kelurahan Kalisari juga menyediakan beberapa macam brosur di meja pelayanan termasuk panduan aktivasi IKD sehingga dapat memudahkan warga untuk menginstal serta melakukan aktivasi IKD. Dengan adanya metode ini, warga merasa sangat terbantu terutama dalam mengikuti digitalisasi pelayanan publik yang dinilai semakin mudah dan praktis. Dengan demikian, upaya optimalisasi aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan keamanan data, sambil tetap memprioritaskan dan melindungi privasi penduduk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan di atas, hasil penelitian dengan teori optimalisasi menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari sudah dapat dikategorikan baik namun belum mencapai pemerataan yang maksimal. Berikut beberapa indikator pendukung optimalisasi di antaranya:

1. Tujuan

Sejauh ini, layanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya telah dijalankan dengan baik dan terdapat sekitar 3-6 warga yang melakukan aktivasi IKD setiap harinya. Sejumlah warga mengatakan bahwa IKD ini merupakan salah satu inovasi terbaik di era digital karena dengan adanya dokumen digital dapat memudahkan warga menyimpan dokumen kependudukannya masing-masing.

2. Keputusan Alternatif

Dalam hal ini, pengambilan keputusan yang telah dilakukan sebagai upaya optimalisasi peningkatan aktivasi IKD dengan melibatkan peran aktif dari petugas kelurahan serta ketua RT dan RW telah berjalan dengan baik walaupun belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang belum sadar akan pentingnya adminduk.

3. Disposisi

Saat ini Kelurahan Kalisari terus mengupayakan pemerataan kepemilikan IKD, hal ini disiasati dengan penyediaan brosur layanan termasuk panduan aktivasi IKD dikarenakan jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk wilayah Kalisari, masih banyak warga yang belum memiliki IKD.

Saran

Untuk mengoptimalkan pemerataan kepemilikan IKD yang ada di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya diperlukan adanya sinergi ekstra dari pegawai dan beberapa tokoh yang terlibat agar menciptakan layanan yang prima dan berkelanjutan seperti

mewajibkan penduduk untuk melakukan aktivasi IKD sebelum mengajukan pelayanan di kantor kelurahan, mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan serta urgensi kepemilikan IKD secara intens, membuat infografis dari rekapitulasi data jumlah pemohon aktivasi IKD untuk mengetahui progress pemerataan kepemilikan IKD, bekerja sama dengan ketua RT dan RW setempat untuk ikut serta mengingatkan penduduk agar segera melakukan aktivasi IKD melalui media sosial, serta mengembangkan dan menjamin sekuritas data pribadi yang ada dalam SIAK agar masyarakat tidak meragukan keamanan dari aplikasi IKD serta dapat menghindari kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, R. R. V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 645-650.
- Aulia, N. N., & Rahmadanik, D. (2023). Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Kelurahan Kalirungkut Kota Surabaya Jawa Timur.
- Darozatulloh, O. (2023). Pemanfaatan Media Digital pada Lingkup Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4).
- Khan, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik bagi Pemimpin di Era Digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9-14.
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi, dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26-34.
- Martha, U. M. (2022). Pelayanan Terintegrasi 3 in 1 Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Terpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo. *PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA*. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). the Implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 105-115.
- Riska, R., Aprilia, V., & Wahyudi, K. E. (2023). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Balai RW Kelurahan Kalirungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Oktober, 2003(19), 645-650.
- Witri, M. G. (2022). Digitalisasi Pelayanan: Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Berbasis Website. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1811-1826.
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya Meningkatkan Kualitas Layanan Publik melalui Digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9-16.
- Zafira, S. A., & Hertati, D. (2023). Pendampingan Pelayanan Identitas Kependudukan Digitaldi Kelurahan Rungkut Kidul Guna Meningkatkan Pelayanan Adminduk Berbasis Digital. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 144-152.